

DOKUMEN AKHIR RENJA SATPOLPP 2023



SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KOTA KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh, Semoga

Allah SWT meridhoi kita sekalian, amin.

Puji dan syukur Kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat karunia serta ridho-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 telah dapat tersusun. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 dan RKPD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023. Selain itu dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD dimaksudkan agar meningkatkan akuntabilitas dan kinerja OPD yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan dokumen ini serta besar harapan kami semoga Dokumen Renja ini dapat menjadi pedoman dalam menyusun rangkaian pekerjaan selanjutnya. Semoga keberadaan dokumen ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kami sehingga tersusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh.

Sarilamak, Maret 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kabupaten Lima Puluh Kota,



FIDRIA FALA, AP.M.Si

NIP. 197511261995011001



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 391 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO*

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 125 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, perlu dibentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2016 Nomor 71) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 80);

19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

: Membentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan *Ex-Officio* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tugas secara umum :
 - a. Mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023;
 - b. Melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah seperti Forum Perangkat Daerah, dan rapat-rapat lainnya.
 - c. Menyusun dan menyajikan Rencana Kerja (Renja), mulai dari Rancangan Awal sampai pada penetapan Renja, sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :
 - a. Ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - b. Wakil Ketua I bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - c. Wakil Ketua II bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - d. Wakil Ketua III bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - e. Sekretaris bertugas mengecek dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - f. Anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, dan menulis serta mengetik naskah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua Tim dapat menetapkan

pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota Tim.

KELIMA

: Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 dan 2022 melalui DPA masing-masing Perangkat Daerah.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 6 Desember 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 391 TAHUN 2021

TANGGAL : 06 Desember 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR
ORGANISASI TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO*

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	SEKRETARIAT DAERAH	
	Sekretaris Daerah	Ketua
	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I
	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan	Wakil Ketua II
	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua III
	Kabag Perencanaan Dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Pemerintahan	Anggota
	Kabag Hukum	Anggota
	Kabag Organisasi	Anggota
	Kabag Administrasi Pembangunan	Anggota
	Kabag Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	Kabag Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Anggota
	Kabag Kesejahteraan Rakyat	Anggota
	Kabag Umum	Anggota
	Kabag Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
	Kasubag Perencanaan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Pelaporan	Anggota

	Kasubag Protokol	Anggota
	Kasubag Komunikasi Pimpinan	Anggota
	Kasubag Dokumentasi Pimpinan	Anggota
	Kasubag Kelembagaan Dan Anjab	Anggota
	Kasubag Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	Anggota
	Kasubag Kinerja Dan Reformasi Birokrasi	Anggota
	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perlengkapan	Anggota
	Kasubag Rumah Tangga	Anggota
	Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Anggota
	Kasubag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Anggota
	Kasubag Pimpinan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa	Anggota
	Kasubag Penyusunan Program	Anggota
	Kasubag Pengendalian Program	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag Evaluasi Dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Pembinaan BUMD Dan BLUD	Anggota
	Kasubag Perekonomian	Anggota
	Kasubag Sumber Daya Alam	Anggota
	Kasubag Peraturan Perundang-Undangan	Anggota
	Kasubag Bantuan Hukum	Anggota
	Kasubag Dokumentasi Dan Informasi	Anggota
	Kasubag Bina Mental Dan Spiritual	Anggota
	Kasubag Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasubag Kesejahteraan Masyarakat	Anggota

	Kasubag Administrasi Pemerintahan Dan Kewilayahan	Anggota
	Kasubag Otonomi Daerah	Anggota
	Kasubag Kerjasama Daerah	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Daerah	Anggota
2.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Sekretaris DPRD	Ketua
	Kabag Umum dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Anggota
	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Anggota
	Kasubag Fasilitasi Penganggaran	Anggota
	Kasubag Program dan Keuangan	Anggota
	Kasubag Kajian Perundang-Undangan	Anggota
	Kasubag Humas, Protokol, dan Publikasi	Anggota
	Kasubag Fasilitasi Pengawasan	Anggota
	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Rumah Tangga	Anggota
	Kasubag Persidangan dan Risalah	Anggota
	Kasubag Kerjasama dan Aspirasi	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
3.	INSPEKTORAT	
	Inspektur	Ketua
	Sekretariat	Sekretaris
	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota

	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Anggota
	Inspektur Pembantu Pengawasan Tertentu	Anggota
	Kasubag Perencanaan	Anggota
	Kasubag Analisi Dan Evaluasi	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag Administrasi Umum Dan Keuanagn	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat	Anggota
	Pelaksana pada Inspektorat	Anggota
4.	DINAS KESEHATAN	
	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
	Sekretaris Dinas Kesehatan	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Kesehatan	Anggota
	Kabid Sumber Daya Kesehatan	Anggota
	Kabid Kesehatan Masyarakat	Anggota
	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Evaluasi, Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan dan Pengelolaan Aset	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Alat Kesehatan dan Fasyankes	Anggota
	Kasi Pelayanan Kefarmasian dan Perizinan	Anggota
	Kasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Anggota
	Kasi Surveilens, Imunisasi dan Penanggulangan Krisis Kesehatan	Anggota
	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Anggota
	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Nafza	Anggota

	Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Anggota
	Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Anggota
	Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Pelayanan Kesehatan Primer	Anggota
	Kasi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pelayanan Kesehatan Haji, dan Jaminan Kesehatan	Anggota
	Kasi Peningkatan Mutu dan Akreditasi, dan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kesehatan	Anggota
5.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris
	Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar	Anggota
	Kabid Pembinaan PAUD dan PNF	Anggota
	Kabid Pembinaan Ketenagaan	Anggota
	Kabid Kebudayaan	Anggota
	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan dan BMD	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Kasi Kurikulum dan Penilaian	Anggota
	Kasi Peserta Didik dan Pendidikan Karakter	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasana	Anggota
	Kasi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana	Anggota

	Kasi Pendidikan Non Formal	Anggota
	Kasi PTK PAUD dan PNF	Anggota
	Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SD	Anggota
	Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SMP	Anggota
	Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota
	Kasi Sejarah dan Nilai Tradisi	Anggota
	Kasi Kesenian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
	Sekretaris Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
	Kepala Bidang Cipta Karya	Anggota
	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
	Kepala Bidang Jasa Konstruksi	Anggota
	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Pelaksanaan Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Bina Marga	Anggota
	Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Anggota
	Kasi Preservasi Jalan dan Jembatan	Anggota
	Kasi Perencanaan Jasa Konstruksi	Anggota
	Kasi Pembinaan dan Pemberdayaan	Anggota

	Kasi Pemantauan Dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Tata Ruang	Anggota
	Kasi Pemanfaatan dan pengendalian	Anggota
	Kasi Pertanahan	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Cipta Karya	Anggota
	Kasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Permukiman	Anggota
	Kasi Tata Bangunan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
7.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	Kepala Satpol PP	Ketua
	Sekretaris Satpol PP	Sekretaris
	Kabid Trantib	Anggota

	Kabid Perlindungan Masyarakat	Anggota
	Kabid PPUD	Anggota
	Kabid SDA	Anggota
	Kasubag Program & Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Intelijen	Anggota
	Kasi Trantib & Pengamanan	Anggota
	Kasi Operasional & Logistik	Anggota
	Kasi Bina Potensi	Anggota
	Kasi Data Informasi	Anggota

	Kasi Satlinmas dan Pengaduan Masyarakat	Anggota
	Kasi Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Kasi Penegakan	Anggota
	Kasi Pembinaan Pengawasan & Penyuluhan	Anggota
	Kasi Pelatihan Dasar	Anggota
	Kasi Teknis Fungsional	Anggota
	Kasi Tindak Internal	Anggota
	Pelaksana pada Satpol PP	Anggota
8.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran	Ketua
	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran	Sekretaris
	Kabid Pencegahan	Anggota
	Kabid Pemadam Dan Penyelamatan	Anggota
	Kabid Sarana Dan Prasarana	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan Dan Keuangan	Anggota
	Kasi Pencegahan Dan Inspeksi	Anggota
	Kasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Dunia Usaha	Anggota
	Kasi Pengendalian Operasi Dan Komunikasi	Anggota
	Kasi Pemadam Dan Investigasi	Anggota
	Kasi Penyelamatan Dan Evakuasi	Anggota
	Kasi Pengadaan Sarana Dan Prasarana	Anggota
	Kasi Pemeliharaan Dan Perawatan Sarana	Anggota
	Kasi Informasi Dan Pengelolaan Data	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pemadam Kebakaran	Anggota

--	--	--

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
9.	DINAS SOSIAL	
	Kepala Dinas Sosial	Ketua
	Sekretaris Dinas Sosial	Sekretaris
	Kabid Rehabilitasi Sosial	Anggota
	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Korban Nafza dan Korban Perdagangan Orang	Anggota
	Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana	Anggota
	Kasi Perlindungan Sosial bagi Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar	Anggota
	Kasi Jaminan Sosial Keluarga	Anggota
	Kasi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran Bantuan Stimulan	Anggota
	Kasi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Sosial	Anggota
10.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris

	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
	Kasubag Perencanaan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Identitas Penduduk	Anggota
	Kasi Pindah Datang Penduduk	Anggota
	Kasi Pendataan Penduduk	Anggota
	Kasi Kelahiran	Anggota
	Kasi Perkawinan dan Perceraian	Anggota
	Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Penyajian Data	Anggota
	Kasi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota
	Kasi Kerjasama	Anggota
	Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Inovasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
11.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	Kepala DPPKBPPPA	Ketua
	Sekretaris DPPKBPPPA	Sekretaris

	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	Anggota
	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk	Anggota
	Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kepala Seksi Penyuluhan, Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Anggota
	Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alokasi	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi	Anggota
	Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan	Anggota
	Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi Anak	Anggota
	Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak	Anggota
	Pelaksana pada DPPKBPPPA	Anggota
12.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

	Kepala DPMPTSP	Ketua
	Sekretaris DPMPTSP	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Terpadu	Anggota
	Kabid Promosi	Anggota
	Kabid Perencanaan dan Pengembangan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pelayanan Perizinan Umum	Anggota
	Kasi Pelayanan Perizinan Umum Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Fasilitasi Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Lainnya	Anggota
	Kasi Promosi	Anggota
	Kasi Sarana dan Prasarana Promosi	Anggota
	Kasi Data dan Informasi	Anggota
	Kasi Perencanaan Potensi dan Peluang Investasi	Anggota
	Kasi Penyuluhan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Regulasi Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pemantauan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pembinaan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pengawasan Penanaman Modal	Anggota
	Pelaksana pada DPMPTSP	Anggota
13.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	

	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Ketua
	Sekretaris Perdagangan, Koperasi UKM	Sekretaris
	Kepala Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kelembagaan & Pengawasan Koperasi	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan & Pengembangan Koperasi & Usaha Mikro	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan perizinan	Anggota
	Kasi Peningkatan kualitas SDM koperasi & kewirausahaan	Anggota
	Kasi Metrologi	Anggota
	Kasi Pengembangan Jaringan Perdagangan	Anggota
	Kasi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan	Anggota
	Kasi Sarana Distribusi dan Stabilitas Barang Pokok dan Penting	Anggota
	Kasi Pengawasan Perizinan dan Pendaftaran	Anggota
	Kasi Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Anggota
	Kasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan	Anggota
	Kasi Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penilaian	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Kesehatan Koperasi	
	Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	Anggota
	Kasi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro	Anggota

	Pelaksana pada Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Anggota
14.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Ketua
	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sekretaris
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Industri	Anggota
	Kabid Sarana dan Prasarana Industri	Anggota
	Kabid Ketenagakerjaan	Anggota
	Kabid Transmigrasi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pembinaan Industri Agro	Anggota
	Kasi Pembinaan Industri Non Agro	Anggota
	Kasi Pengawasan, Sertifikasi dan Standarisasi Industri	Anggota
	Kasi Perizinan dan Data	Anggota
	Kasi Pengembangan teknologi Industri	Anggota
	Kasi Promosi dan Pemasaran	Anggota
	Kasi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja	Anggota
	Kasi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
	Kasi Perlindungan Tenaga Kerja	Anggota
	Kasi Penempatan Transmigrasi	Anggota
	Kasi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Anggota
	Kasi Informasi dan Pembinaan SDM Transmigrasi	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
15.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Kepala Diskominfo	Ketua

	Sekretaris Diskominfo	Sekretaris
	Kabid Komunikasi Publik	Anggota
	Kabid Aplikasi Informatika	Anggota
	Kabid Statistik dan Pelayanan Informasi Publik	Anggota
	Kabid Persandian Dan Manajemen Data Elektronik	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik	Anggota
	Kasi Pengelola Media Komunikasi Publik	Anggota
	Kasi Layanan Hubungan Media Dan Kehumasan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3

	Kasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Anggota
	Kasi Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Anggota
	Kasi Aplikasi	Anggota
	Kasi Statistik Sektor Ekonomi Dan Infastruktur	Anggota
	Kasi Statistik Sektor Pemerintahan Dan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan Informasi Publik	Anggota
	Kasi Identifikasi Deteksi Dan Proteksi Keamanan SIBER	Anggota
	Kasi Penanggulangan Pemulihan Pemantauan Dan Pengendalian	Anggota
	Kasi Manajemen Data Elektronik	Anggota
	Pelaksana pada Diskominfo	Anggota
16.	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	

	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Ketua
	Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kabid Pariwisata	Anggota
	Kasi Promosi dan Informasi	Anggota
	Kasi Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata	Anggota
	Kasi Kemitraan dan Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Kabid Pemuda	Anggota
	Kasi Peningkatan Kreatifitas Kewirausahaan Pemuda	Anggota
	Kasi Pengembangan Kompetensi Pemuda	Anggota
	Kasi Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Anggota
	Kabid Olahraga	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Pendidikan	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Prestasi	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Rekreasi dan Tradisi	Anggota
	Kabid Sarana Prasarana dan Pengembangan SDM	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana Pariwisata	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana Pemuda Olah Raga	Anggota
	Kasi Pendataan dan Pengembangan SDM	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Anggota
17.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	
	Kepala DPMD/N	Ketua

	Sekretaris DPMD/N	Sekretaris
	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Kabid Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Ketahanan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Adat, Sosial Budaya dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kawasan Nagari, SDA dan TTG	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Aparatur dan Lembaga Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kasi Administrasi Produk Hukum Nagari dan Kerjasama antar Nagari	Anggota
	Kasi Organisasi Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kasi Perencanaan Keuangan Nagari	Anggota
	Kasi Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Nagari	Anggota
	Kasi Aset dan Kekayaan Nagari	Anggota
	Pelaksana pada DPMD/N	Anggota
18.	DINAS PERHUBUNGAN	
	Kepala Dinas Perhubungan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perhubungan	Sekretaris
	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Anggota

	Kepala Bidang Prasarana	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Lalu Lintas	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana	Anggota
	Kasi Pengujian Sarana	Anggota
	Kasi Angkutan	Anggota
	Kasi Pengoperasian Prasarana	Anggota
	Kasi Perawatan Prasarana	Anggota
	Kasi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	Anggota
	Kasi Lingkungan Perhubungan	Anggota
	Kasi Keselamatan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
19.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN	
	Kepala DLHPP	Ketua
	Sekretaris DLHPP	Sekretaris
	Kabid Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kapasitas Lingkungan Hidup	
	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan	Anggota
	Kabid Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota

	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Operasional Penanganan Sampah	Anggota
	Kasi Pengelolaan Limbah dan Sampah	Anggota
	Kasi Pertamanan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Anggota
	Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Anggota
	Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Perumahan	Anggota
	Kasi Kawasan Permukiman	Anggota
	Kasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Anggota
	Analisis Lingkungan Hidup	Anggota
	Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan	Anggota
	Pelaksana pada DLHPP	Anggota
20.	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	Kepala Distanhorbun	Ketua
	Sekretaris Distanhorbun	Sekretaris
	Kabid Sarana	Anggota
	Kabid Prasarana	Anggota
	Kabid Perlindungan Tanaman Dan Perizinan Usaha	Anggota
	Kabid penyuluhan	Anggota
	Kasubag Perencanaan Dan Evaluasi	Anggota
	Kasubag Keuangan Dan Aset	Anggota

	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Pupuk Dan Pestisida	Anggota
	Kasi Sumber Daya Genetik	Anggota
	Kasi Alat Dan Mesin Pertanian	Anggota
	Kasi Pengembangan Prasarana	Anggota
	Kasi Irigasi	Anggota
	Kasi Infrastruktur Pertanian	Anggota
	Kasi Perlindungan Tanaman	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Kasi Penanganan Dampak Perubahan Iklim Dan Bencana Alam	Anggota
	Kasi Perizinan Dan Pembinaan Usaha	Anggota
	Kasi Kelembagaan	Anggota
	Kasi Ketenagaan	Anggota
	Kasi Penyelenggaraan Penyuluhan	Anggota
	Pelaksana pada Distanhorbun	Anggota
21.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua
	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sekretaris
	Kabid Perbibitan dan Produksi	Anggota
	Kabid Keswan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Kabid. Sarana dan Prasarana	Anggota
	Kabid Penyuluhan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota

	Kasi Kasi Non Ruminansia	Anggota
	Kasi Kasi Ruminansia	Anggota
	Kasi Perbibitan	Anggota
	Kasi Kesmavet	Anggota
	Kasi Kesehatan Hewan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Kasi Pakan	Anggota
	Kasi Pembiayaan dan Investasi	Anggota
	Kasi Lahan dan Irigasi	Anggota
	Kasi Kelembagaan	Anggota
	Kasi Metode dan Infomasi	Anggota
	Kasi Ketenagaan	Anggota
	Pelaksana pada Disnakkeswan	Anggota
22.	DINAS PERIKANAN	
	Kepala Dinas Perikanan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perikanan	Sekretaris
	Kabid Pengembangan Sumberdaya Perikanan	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Usaha Perikanan	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Pengelolaan Kawasan Budidaya, Tata Pemanfaatan Air, Lahan dan Pelestarian Plasma Nutiah	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Kasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Anggota

	Kasi Pengendalian Mutu Pembudiyaaan Ikan	Anggota
	Kasi Sarana dan Prasarana Perikanan	Anggota
	Kasi Jaminan Perlindungan Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Penguatan Daya Saing Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Kemitraan Usaha dan Fasilitasi Perizinan Perikanan	Anggota
	Kasi Kelembagaan, Pendampingan dan Koordinasi Penyuluhan Perikanan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perikanan	Anggota
23.	DINAS PANGAN	
	Kepala Dinas Pangan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pangan	Sekretaris
	Kabid Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
	Kabid Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Ketersediaan Pangan	Anggota
	Kasi Distribusi dan Harga Pangan	Anggota
	Kasi Kerawanan Pangan	Anggota
	Kasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Anggota
	Kasi Pengembangan Pangan Lokal	Anggota
	Kasi Keamanan Pangan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pangan	Anggota
24.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua

	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris
	Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Deposit dan Pelestarian Bahan Pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Promosi dan Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pengembangan, Pengolahan Bahan Pustaka dan TIK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Arsip Dinamis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Arsip Statis dan Layanan Informasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pembinaan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pengawasan Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Fungsional Pustakawan	Anggota
	Fungsional Kearsipan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pustaka dan Kearsipan	Anggota

25.	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	Kepala Bapelitbang	Ketua
	Sekretaris Bapelitbang	Sekretaris
	Kabid Ekonomi Penelitian dan Pengembangan	Anggota
	Kabid SDM, Sosbud dan Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Kabid Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi Bapelitbang	Anggota
	Kabid Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Program Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Keuangan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pertanian dan Perikanan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Perindustrian, Perdagangan, UMK, Penanaman Modal dan Pariwisata Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Sosial Budaya Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Sumber Daya Manusia Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Infrastruktur Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pengembangan Wilayah Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Data dan Informasi Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang	Anggota
	Pelaksana pada Bapelitbang	Anggota
26.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	

	Kepala BKPSDM	Ketua
--	---------------	-------

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Sekretaris BKPSDM	Sekretaris
	Kabid Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Manajerial ASN	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Kabid Pengembangan dan Disiplin ASN	Anggota
	Kasubid Kepangkatan	Anggota
	Kasubid Mutasi	Anggota
	Kasubid Disiplin ASN	Anggota
	Kabid Informasi Pengadaan dan Status PNS	Anggota
	Kasubid Status ASN	Anggota
	Kasubid Informasi ASN	Anggota
	Kasubid Formasi dan Pengadaan ASN	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada BKPSDM	Anggota
27.	BADAN KEUANGAN	
	Kepala Badan Keuangan	Ketua
	Sekretaris Badan Keuangan	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kabid Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota

	Kasubid 1 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kabid Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kabid Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Evaluasi Pendapatan Daerah	
	Kasubid 1 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota

	Kasubid 2 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Pelaksana pada Badan Keuangan	Anggota
28.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Ketua
	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sekretaris
	Kabid Ideologi Dan Wasbang	Anggota
	Kabid Politik Dalam Negeri	Anggota
	Kabid Kewaspadaan Dan Pembinaan Masyarakat	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubid Bina Ideologi	Anggota
	Kasubid Bina Wasbang	Anggota
	Kasubid Bintang, Eksosbud Dan Agama	Anggota
	Kasubid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini	Anggota
	Kasubid HAL Dan Fasilitasi Pemilu	Anggota
	Kasubid Fasilitasi Parpol Dan Ormas	Anggota
	Pelaksana pada Badan Kesbangpol	Anggota
29.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	Kepala Pelaksana BPBD	Ketua
	Sekretaris BPBD	Sekretaris
	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota
	Kabid Kedaruratan dan Logistik	Anggota
	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota

	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pencegahan	Anggota
	Kasi Kesiapsiagaan	Anggota
	Kasi Kedaruratan	Anggota
	Kasi Logistik	Anggota
	Kasi Rehabilitasi	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Rekonstruksi	Anggota
	Pelaksana pada BPBD	Anggota
30.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS	
	Direktur RSUD dr. Achmad Darwis	Ketua
	Kabag Tata Usaha	Sekretaris
	Kabid Perencanaan Pelaporan Sarana Prasarana dan Logistik	Anggota
	Kabid Pelayanan Penunjang dan Promosi Kesehatan	Anggota
	Kabid Pelayanan Medis dan Keperawatan	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana Dan Logistik	Anggota
	Kasi Perencanaan Dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Pelayanan Penunjang Medis	Anggota
	Kasi Pelayanan Penunjang Non Medis Dan Promosi Kesehatan	Anggota
	Kasi Pelayanan Medis	Anggota
	Kasi Pelayanan Perawatan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Humas	Anggota

	Kasubag Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	Anggota
	Pelaksana pada RSUD Achmad Darwis	Anggota
31.	KECAMATAN GUGUAK	
	Camat Guguak	Ketua
	Sekretaris Camat Guguak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Guguak	Anggota
32.	KECAMATAN PAYAKUMBUH	
	Camat Payakumbuh	Ketua
	Sekretaris Camat Payakumbuh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Pelayanan	Anggota

	Pelaksana pada Kecamatan Payakumbuh	Anggota
33.	KECAMATAN MUNGKA	
	Camat Mungka	Ketua
	Sekretaris Camat Mungka	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Mungka	Anggota
34.	KECAMATAN SULIKI	
	Camat Suliki	Ketua
	Sekretaris Camat Suliki	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Suliki	Anggota
35.	KECAMATAN BUKIK BARISAN	

	Camat Bukik Barisan	Ketua
	Sekretaris Camat Bukik Barisan	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Bukik Barisan	Anggota
36.	KECAMATAN GUNUANG OMEH	
	Camat Gunuang Omeh	Ketua
	Sekretaris Camat Gunuang Omeh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Gunuang Omeh	Anggota
37.	KECAMATAN LUAK	
	Camat Luak	Ketua

	Sekretaris Camat Luak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Luak	Anggota
38.	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	
	Camat Lareh Sago Halaban	Ketua
	Sekretaris Camat Lareh Sago Halaban	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Lareh Sago Halaban	Anggota
39.	KECAMATAN HARAU	
	Camat Harau	Ketua
	Sekretaris Camat Harau	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota

	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Harau	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
40.	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	
	Camat Situjuah Limo Nagari	Ketua
	Sekretaris Camat Situjuah Limo Nagari	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Situjuah Limo Nagari	Anggota
41.	KECAMATAN AKABILURU	
	Camat Akabiluru	Ketua
	Sekretaris Camat Akabiluru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota

	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
--	---------------------------	---------

	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Akabiluru	Anggota
42.	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
	Camat Pangkalan Koto Baru	Ketua
	Sekretaris Camat Pangkalan Koto Baru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Anggota
43.	KECAMATAN KAPUR IX	
	Camat Kapur IX	Ketua
	Sekretaris Camat Kapur IX	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Kapur IX	Anggota

Ditetapkan di Sarilamak
 Pada tanggal 6 Desember 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

DAFTAR ISI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 391 TAHUN 2021

TANGGAL : 6 DESEMBER 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENYUSUN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO*

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	8
2.1 Evaluasi hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	8
2.2 Analisis Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	21
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	23
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	24
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	24
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota.....	24
3.3 Program dan Kegiatan	25
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	41
4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN 2023	41
BAB V PENUTUP	44
5.1 KAIDAH PELAKSANAAN.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban menyusun RENJA (Rencana Kerja) sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan tolok ukur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. Tujuannya adalah agar dapat memberikan kontribusi nyata dan faktual terhadap peningkatan pembangunan daerah dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RenjaSKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kepala Satpol PP menyiapkan Renja Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja.

Fungsi RENJA Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam pembangunan daerah dan merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan RENJA Satuan Polisi Pamong Praja dalam tahun berjalan dilakukan dengan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian pelaksanaan Renja tersebut

dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja.

Penyusunan RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, serta analisis kinerja.

Seperti yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Hal ini bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah dan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban menyusun RENJA (Rencana Kerja) sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan tolok ukur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. Tujuannya adalah agar dapat memberikan kontribusi nyata dan faktual terhadap peningkatan pembangunan daerah di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RenjaSKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan

langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja juga menyiapkan Renja Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra- Satuan Polisi Pamong Praja.

Fungsi RENJA Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam pembangunan daerah dan merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan RENJA Satuan Polisi Pamong Praja dalam tahun berjalan dilakukan dengan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian pelaksanaan Renja tersebut dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja.

Penyusunan RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, serta analisis kinerja.

Seperti yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Hal ini bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah dan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan

awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Mengingat pentingnya dokumen ini sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten lima Puluh Kota untuk tahun mendatang, maka kebijakan-kebijakan yang ditetapkan harus mendukung efektifitas pelaksanaan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara 5657);
4. Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang pengarusutamaan Gender;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Satndar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Awal Renja OPD Tahun 2023 dimaksudkan untuk memberikan pedoman, arahan dan acuan dalam menentukan skala prioritas program dan indikasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun anggaran 2023. Dengan demikian Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dimaksudkan untuk:

1. Menetapkan prioritas program dan kegiatan disertai pagu indikatif pada tahun 2023;
2. Merumuskan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota dan kerangka pendanaan pada tahun 2023;

Adapun tujuan Rencana Kerja Akhir Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023;
2. Sebagai acuan dalam penyusunan program prioritas dan indikasi kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023;
3. Menjadi acuan dalam perumusan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023;
4. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023;
5. Sebagai bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Kerja Akhir pada dokumen hasil Penyusunan Rencana Kerja Akhir dapat di lihat pada pokok bahasan dan susunan garis besarnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Akhir Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Lima Puluh Kota
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA AKHIR DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **BAB V PENUTUP**

Bab ini diuraikan mengenai penjelasan akhir terkait Penyusunan Rancangan Awal Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 sebagai pedoman kerja termasuk harapan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN LALU

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Lima Puluh Kota adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Lima Puluh Kota. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Lima Puluh Kota ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

2.1 Evaluasi hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2021 adalah :

- 1.** Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota melalui 6 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan yang berada di bawah Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dengan target kinerja 12 bulan dengan capaian kinerja 12 bulan (100%).
- 2.** Program PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM melalui 9 Kegiatan dan 11 Sub Kegiatan yang berada di bawah 4 (empat) Bidang Satuan Polisi Pa
- 3.** mong Praja dengan target kinerja 12 bulan dengan capaian kinerja 12 bulan (100%).

Adapun Kendala dan Hambatan dalam pelaksanaan Program/Kegiatan

1. Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia aparat pelaksana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi sesuai dengan jabatan dan beban tugas yang akan dikerjakan mengakibatkan lambatnya pelaksanaan kegiatan.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Masih kurangnya Perjalanan Dinas untuk mengikuti pelatihan dan Sosialisasi tingkat pusat.

Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut

1. Perlunya adanya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan mutu dari SDM.
2. Untuk sarana dan prasarana penunjang yang kurang, telah diusulkan melalui APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Sarana dan Prasarana yang dimaksud.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel II.2 berikut:

Tabel TC -1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satpol PP dan Pencapaian Renstra Satpol PP s/d Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2022)	Realisasi Capaian Target SKPD s/d tahun 2022	
					Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana strategis Satpol PP, Jumlah dokumen Renja Satpol PP, Jumlah dokumen Sakip, Jumlah dokumen SPIP	1dokumen	1dokumen	1dokumen	1dokumen	100%	1dokumen		100%
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun tahun 2021	1dokumen	1dokumen	1dokumen	1dokumen	100%	1dokumen		100%
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang tersusun	1dokumen	1dokumen	1dokumen	1dokumen	100%	1dokumen		100%
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang tersusun	1dokumen	1dokumen	1dokumen	1dokumen	100%	1dokumen		100%

01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang tersusun	1dokumen	1dokumen	1dokumen	1dokumen	100%	1dokumen		100%
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja yang tersusun tahun 2021	1dokumen	1dokumen	1dokumen	1dokumen	100%	1dokumen		100%
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan Evaluasi kinerja OPD yang tersusun tahun 2021	54 dokumen	54 dokumen	54 dokumen	54 dokumen	100%	54 dokumen		100%
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Honorarium PPK, Jumlah honorarium KPA, Jumlah honorarium PPTK, Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN, Jumlah penyediaan honorarium PA	14 bulan, 72 dokumen	100%	14 bulan, 72 dokumen		100%			
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen		100%
01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen		100%
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	100%	14 dokumen		100%
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas lapangan beserta kelengkapannya	130 stel	130 stel	130 stel	130 stel	100%	130 stel		100%

01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	60 dokumen	60 dokumen	60 dokumen	60 dokumen	100%	60 dokumen	60 dokumen	100%
01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti HUT Satpol PP Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten	-	-	5 Orang mengikuti hut tk provinsi	5 Orang mengikuti hut tk provinsi	100%	10 Orang mengikuti hut tk provinsi, 5 hut tk nasional		100%
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan alat kebersihan kantor, Jumlah kebutuhan ATK Kantor	9 Komponen 25 Komponen	9 Komponen 25 Komponen	9 Komponen 25 Komponen	9 Komponen 25 Komponen	100%	9 Komponen 25 Komponen		100%
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Kebutuhan Cetak dan Penggandaan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan		100%
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	Jumlah koran harian lokal yang tersedia, jumlah koran harian regional	152 exl	152 exl	152 exl	152 exl	100%	152 exl		100%
01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman rapat, jumlah makanan dan minuman tamu	350 porsi	350 porsi	350 porsi	350 porsi	100%	350 porsi		100%
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kebutuhan Perjalanan Dinas Keluar Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan		100%
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100%			100%
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 10000	143	143	143	143	100%	143		100%

01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening listrik,telpon,internet,dan air	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan		100%
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran honor PTT,Pembayaran honor tenga kebersihan,pembayaran honor tim pelaksana kegiatan dan sekretarian pelaksana kegiatan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen		100%
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100%			100%
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan	Jumlah belanja bahan bakar / pelumas, jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 2 (dua), jumlah pemeliharaan kendaraan dinas roda 4(empat)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan		100%
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan personal computer/ notebook,pemeliharaan printer	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan		100%
01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana PendukungGedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah biaya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor					100%			100%
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						100%			100%
02.2.01.	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda					100%			100%
02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,Pelaksanaan Patroli,Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Deteksi dini dan cegah dini,Jumlah personil yang mengikuti kegiatan potang balimau,Jumlah personil yang ikut dalam operasi ketupat, Jumlah personil yang mengikuti kegiatan pengamanan kepala daerah/ Tamu VVIP,Jumlah wilayah dalam Pengawasan patroli			40 data, 80 orang tenaga PAM, 13 Kecamatan		100%			100%

02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah data dan informasi kasus kebisingan yang di terima	Penertiban PSK 12 x, Tuak 6 x, inhalen 4 x, penertiban anak sekolah 4 x	Penertiban PSK 12 x, Tuak 6 x, inhalen 4 x, penertiban anak sekolah 4 x	12 data		100%			100%
02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	13 Kecamatan	13 Kecamatan	13 Kecamatan	13 Kecamatan	100%	13 Kecamatan	13 Kecamatan	100%
02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota Satlinmas nagari yang terlatih dalam rangka persiapan pemilihan wali nagari			26 orang satlinmas		100%			100%
02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Ketersediaan pengawas petugas piket, Jumlah ketersediaan tenaga kontrak untuk pengamanan, penertiban, petugas piket Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, Kantor DPRD, Kantor Bupati, Exs Kantor Bupati dan tempat-tempat yang dianggap perlu sesuai peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku	126 orang tenaga paket kantor	126 orang tenaga paket kantor	52 orang, 83 orang		100%			100%
02.2.01.07	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penertiban PSK, Siswa PKL, Miras, Inhalen, Pedagang Mercon, Warkel dan Baliho/Spanduk			250 objek		100%			100%

02.2.01.08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pengaduan yang diterima dari masyarakat, Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti, Jumlah unit pelayanan pengaduan masyarakat yang terbentuk, Jumlah pos jaga ronda yang dibangun	5 Pengaduan		35 pengaduan	4 pengaduan	100%			100%
02.2.01.09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat	ini Jumlah Aparatur yang mengikuti kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta pendidikan dan pelatihan (Bimtek Penyusunan SOP Satpol pp)			20 orang		100%			100%
02.2.02.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	Persentase Penurunan Jumlah Pasien Positif Covid 19 dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap dengan prokes. Persentase penurunan kasus pelanggaran Perda.					100%			100%
02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Anggota Satpol PP Yang mengikuti HUT Satpol PP tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten					100%			100%
02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Pengawasan Perda					100%			100%
02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Pelaksanaan Penegakan Perda Kabupaten dan Peraturan Bupati	2 x sosialisasi Perda No 3 Tahun 2017, 5 x Pengawasan, 4 x Koordinasi	2 x sosialisasi Perda No 3 Tahun 2017, 5 x Pengawasan, 4 x Koordinasi			100%			100%
02.2.03.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda					100%			100%

02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Intelijen (PPNS) Satpol PP DI Pusdiklat Soreang Bandung, Jumlah aparatur yang mengikuti kursus/ pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan (Sosialisasi Peratiran Daerah dan Kepala Daerah)					100%			100%
------------	---------------------------------------	---	--	--	--	--	------	--	--	------

Adapun permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh kota sebagai berikut:

1. Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia;
2. Belum optimalnya koordinasi;
3. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan
4. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.
5. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kerja diantara mobiler dan Komputer PC.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja program dan kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.
2. Capaian Analisis Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan diantaranya untuk program/kegiatan dan pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 memiliki tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah SATPOL PP kabupaten Lima Puluh Kota dirumuskan sebagai berikut: Tujuan : Meningkatkan kualitas penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat . Sasaran dari tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Ketertiban umum.

Standar Pelayanan Minimal menjadi kewajiban yang harus di penuhi oleh daerah sesuai dengan PP No 2 Tahun 2018 dan dijabarkan dalam Permendagri 100 tahun 2018, dimana pencapaian target SPM 100 % menjadi kinerja kepala daerah. Secara rinci akan dijelaskan tentang layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satpol PP dengan jenis pelayanan dasar adalah *Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum* dengan Indikator Pencapaian yaitu *Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada*.

Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota seperti pada tabel II.2 berikut.

**Tabel II.2. Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota**

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+2)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IKU Restra 2021-2026												
1	Persentase Penegakan Perda/perbup			62%	67%	72%	77 %					
2	Persentase Penyakit Masyarakat Yang Tertangani diTahun ini			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
3	Persentase Pengaduan Masyarakat Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang ditindak lanjuti ditahun ini			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
SPM/standar nasional												

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+2)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Index Kinerja Kunci												
			Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Rencana kerja Akhir yang disusun dan akan dilaksanakan pada tahun 2021 tidak terlepas dari analisis strategis terhadap lingkungan kerja yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota, mencakup Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota. Berikut ini aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi, yaitu:

1. Belum Optimalnya Penegakan Peraturan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menegakan Peraturan Daerah, yang berarti upaya Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjamin dan memastikan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran Perda yang dapat mengganggu tatanan kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi karena beberapa Perda belum mempunyai sanksi hukum yang tegas; kebocoran Informasi razia yang masih ada; jumlah PPNS tidak seimbang dengan jumlah Perda yang akan ditegakan.

2. Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Tingkat heterogen masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota cukup tinggi sehingga dapat menyebabkan terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kemudian dapat juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum yang dibuat oleh Pemerintahan Daerah sehingga menimbulkan gesekan – gesekan antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan Pemerintah.

3. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat optimal

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, bahwa Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun, pada saat ini bergesernya gaya hidup masyarakat yang mengarah ke individualisme sehingga kurangnya masyarakat mengikuti penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Padahal perlindungan masyarakat merupakan benteng awal agar terjadinya suasana yang kondusif.

4. Masih terjadinya perbuatan maksiat di Kabupaten Lima Puluh Kota

Misi Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan RPJMD periode tahun 2021- 2026 adalah masuk pada Misi Kesatu yakni *“Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berMandaskan keimanan.”*

Satpol PP termaktub dalam arah kebijakan no 63 Pembinaan dalam rangka pemberantasan penyakit masyarakat mengandung makna bahwa kualitas pelayanan penegakan perda terhadap masyarakat yang melanggar terutama dalam pemberantasan maksiat perlu ditingkatkan yang menjadi tolok ukur keberhasilan sebuah organisasi dalam menjalankan kinerja dan kerja sehingga tercipta citra yang positif dari masyarakat (publik) terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP secara profesional yang mengarah pada perwujudan Kabupaten Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Rangka Adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah.

Kabupaten Lima Puluh Kota adalah wilayah Perlintasan antar Kota dan Antar Provinsi maka peluang terjadi perbuatan maksiat di Kabupaten Lima Puluh Kota terutama wilayah perbatasan sangat sangat terbuka lebar.

5. Pelaksanaan tata pemerintahan yang belum maksimal

Untuk pelaksanaan tata pemerintahan yang baik maka harus ditingkatkan pelayanan publik, sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan yang bagus. Kemudian salah satu kunci sukses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi suatu organisasi adalah aparatur yang berkualitas. Namun pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan pengembangan sumber daya aparatur masih kurang maksimal, hal ini terjadi karena anggaran, kuantitas aparatur dan program/kegiatan pendidikan serta pelatihan aparatur masih terbatas. Kemudian belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kabupaten/Kota.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam menyusun dokumen perencanaan Rencana Kerja Akhir, maka diperlukan review terhadap rancangan awal RKPD agar terwujudnya keselarasan dan kesesuaian antar dokumen perencanaan sehingga pembangunan daerah dapat terwujud. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota yang mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat akan melaksanakan misi kesatu, yaitu:

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka menyukseskan pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota perlu didukung oleh berbagai pemangku kepentingan. Sehubungan hal tersebut, pemangku kepentingan dapat memberikan saran dan masukan terhadap rencana kerja akhir ke beberapa usulan program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota. Usulan dari pemangku kepentingan bisa didapatkan melalui pengumpulan data dan informasi dari rapat – rapat seperti dalam acara sosialisasi PERDA. Kemudian melalui koordinasi dan konsolidasi program dengan kegiatan dengan pemangku kepentingan serta pengamatan dilapangan. Selanjutnya usulan tersebut harus ditelaah yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota dan program prioritas pembangunan daerah. Pada rencana kerja tahun 2023, ada beberapa usulan kegiatan dari pemangku kepentingan diantaranya dari perangkat daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sendiri dan lembaga lainnya, sehingga dianalisis dan disesuaikan dengan keadaan anggaran dan tupoksi Satpol PP dan Satlinmas.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Direktorat Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia merupakan instansi pusat yang berkaitan dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan rencana strategisnya terdapat rencana pembangunan yaitu program bina administrasi kewilayahan pada kegiatan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Sehubungan hal diatas dan menindaklanjutinya, bupati Lima Puluh Kota sebagai pelaksana pemerintahan di daerah harus melaksanakan urusan pemerintahan wajib dengan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu : ketenteraman, ketertiban umum dan serta perlindungan masyarakat dan dalam hal ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sehingga salah satu arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah nantinya adalah penegakan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Kemudian tantangan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota kedepan akan semakin berat diantaranya kemungkinan terjadinya konflik horizontal maupun konflik vertikal serta berbagai bentuk gangguan lainnya yang mengancam kenyamanan masyarakat dan kekayaan daerah dan harus dapat ditangani secara koordinatif, komprehensif dan profesional.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota merumuskan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Tercapainya dan terarahnya suatu rancangan akhir rencana kerja (Renja) SKPD Tahun 2023 mendatang.
2. Agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran yang diinginkan yaitu untuk meningkatkan ketertiban umum ketentraman masyarakat.
3. Meningkatkan koordinasi, monitoring, pembinaan dan evaluasi dengan SKPD terkait agar terwujudnya peningkatan ketertiban dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota.

4. Meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dan warga Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan penegakan Peraturan daerah, keputusan Kepala daerah dan produk hukum daerah lainnya.
5. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang tujuan Peraturan daerah, Keputusan Kepala daerah dan Produk Hukum Daerah lainnya dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan warga kota dalam menegakan Peraturan daerah, Keputusan Kepala daerah dan Produk Hukum daerah lainnya dengan menghormati hak asasi manusia yang berlandaskan keadilan.

Dalam rangka untuk menindaklanjuti Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu ditentukan Sasaran yang akan dicapai, agar lebih terukur, terdiri dari :

1. Melakukan upaya penyadaran warga masyarakat tentang produk hukum (Perda) dan/atau keputusan kepala daerah dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan Perda di 13 Kecamatan
2. Penertiban Homestay, cafe music dan salon
3. Penertiban IMB/SITU dan bangunan liar
4. Melaksanakan Peradilan Cepat
5. Penertiban Pekerja Sex Komersial
6. Penertiban Rental VCD/DVD porno
7. Penertiban Warung Kelambu
8. Penertiban Minuman keras
9. Pembinaan Pekerja Sex Komersial
10. Meningkatkan sarana dan Prasarana Kantor
11. Pembinaan sistem dan management kantor
12. Penertiban Papan Reklame
13. Peningkatan profesionalisme dan kinerja personil

3.3 Program Dan Kegiatan

Rumusan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota yang direncanakan tahun 2023, didasarkan pada pertimbangan dari

berbagai faktor – faktor, diantaranya tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, isu – isu strategis dan gambaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota serta pertimbangan dokumen perencanaan lainnya serta masukan dan saran dari pemangku kepentingan.

Program yang akan dilaksanakan adalah 2 program dengan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lima Puluh Kota serta ditambah diluar pagu. Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa perlu didukung dengan program kegiatan serta anggaran yang sesuai kebutuhan serta penambahan kegiatan agar dapat tepat sasaran.

Berikut Tabel Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

Tabel III.1. Tabel Rencana Program dan Kegiatan
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
Kabupaten Lima Puluh Kota OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an				Tolok Ukur	Targ et	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				13,709,005,636				17,710,000,000	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7,152,273,936				4,500,000,000	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				157,819,200				0	

1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penyusunan dokumen Refisi Renstra Satpol PP yang tersusun tahun 2023 Jumlah penyusunan dokumen Renja Satpol PP yang tersusun tahun 2023	persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja		20 %	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 laporan	100 %	51,070,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah	20 %	0
---	----	----	------	----	---	---	---	---	--	------	--	-------	------------	--------------------------------------	---	------	---

27

							Jumlah Penyusunan laporan IKU Satpol PP	Perangkat Daerah									
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen RKA pergeseran yang tersusun tahun 2023 Jumlah dokumen RKA yang tersusun tahun 2023	persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah		20 %	1 dokumen 1 dokumen	100 %	13,018,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah	20 %	0
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang tersusun tahun 2023 Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang tersusun tahun 2023	persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah		20 %	1 dokumen 1 Dokumen	100 %	15,408,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah	20 %	0
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen DPA Pergeseran yang tersusun tahun 2023 Jumlah dokumen DPA yang tersusun tahun 2023	persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah		20 %	1 dokumen 1 dokumen	100 %	11,562,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah	20 %	0

28

1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan Capaian Kinerja yang tersusun tahun 2023 Jumlah Laporan Prognosis	persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah		20 %	0 12 laporan 1 laporan	Laporan laporan	100 %	30,947,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah	20 %	0
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen LKJIP yang tersusun tahun 2023 Jumlah Dokumen LKPJ dan LPPD Yang tersusun tahun 2023 Jumlah dokumen SPM yang tersusun tahun 2023 Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat yang tersusun tahun 2023 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah		20 %	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 Laporan		100 %	35,811,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah	20 %	0
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5,025,716,936			4,500,000,000		
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tertibnya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah pembayaran gaji dan Tunjangan PNS Jumlah Pembayaran tunjangan kinerja PNS	Jumlah persentase tertibnya administrasi keuangan		20 %	0 Orang/bu la 14 bulan 12 bulan	n 100 %		4,985,601,936	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Tertibnya administrasi keuangan perangkat daerah	20 %	4,500,000,000
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Tertibnya administrasi keuangan daerah	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun Satpol PP yang tersusun	Jumlah persentase tertibnya administrasi keuangan		20 %	1 dokumen		100 %	16,655,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Tertibnya administrasi keuangan perangkat daerah	20 %	0

1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Tertibnya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan/bulanan dan semesteran yang disiapkan	Jumlah persentase teribnya administrasi keuangan		20 %	12 Laporan	100 %	23,459,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Tertibnya administrasi keuangan perangkat daerah	20 %	0
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							478,072,200				0	
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan nya	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepagawaia n perangkat daerahPerse ntase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut KelengkapanJumlah Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan	persentase pelaksanaan adminstrasi kepegawaian		20 %20 %	0 Paket135 Stel	100 %	298,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepagawaian perangkat daerahPersen tase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta	20 %20 %	0

29

						Laporan OPD									Penyusunan Laporan OPD		
1	05	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepagawaia n perangkat daerah Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD	Jumlah komponen alat tulis kantor yang tersedia	persentase pelaksanaan adminstrasi kepegawaian		20 % 20 %	15 kompone	n100 %	45,000,000		Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepagawaian perangkat daerah Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD	20 % 20 %	0

30

1	05	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kependidikan perangkat daerah Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD	Jumlah Kegiatan yang dilakukan untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian		20 % 20 %	1 Kegiatan	100 %	65,556,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kependidikan perangkat daerah Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD	20 % 20 %	0
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kependidikan perangkat daerah Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD		persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian		20 % 20 %		100 %	68,966,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kependidikan perangkat daerah Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD	20 % 20 %	0
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								119,176,600			0	

1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase peningkatan Administrasi Umum	Jumlah Komponen alat listrik	Jumlah peningkatan Administrasi Umum		20 %	6 komponen	t 366934 974 e	ksemplar 3,561,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase peningkatan Administrasi Umum	20 %	0
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase peningkatan Administrasi Umum	Jumlah belanja modal laptop Jumlah belanja modal printer	Jumlah peningkatan Administrasi Umum		20 %	1 unit 1 unit	366934 974 e	ksemplar 25,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase peningkatan Administrasi Umum	20 %	0
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	persentase peningkatan Administrasi Umum	Jumlah belanja gordena Jumlah belanja modal tv	Jumlah peningkatan Administrasi Umum		20 %	17 meter 1 unit	366934 974 e	ksemplar 7,690,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase peningkatan Administrasi Umum	20 %	0
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase peningkatan Administrasi Umum	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah kebutuhan ATK Kantor	Jumlah peningkatan Administrasi Umum		20 %	19 komponen 52 komponen	366934 4974 e n	ksemplar 36,383,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase peningkatan Administrasi Umum	20 %	0
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	persentase peningkatan Administrasi Umum	Jumlah cetak blanko SPPD Jumlah foto copy kertas folio/kwarto Jumlah jilid	Jumlah peningkatan Administrasi Umum		20 %	15 Rim 85000 lemba 150 buah	r 366934 974 e	ksemplar 24,820,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase peningkatan Administrasi Umum	20 %	0
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	persentase peningkatan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan Jumlah Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan Jumlah Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah peningkatan Administrasi Umum		20 %	0 Dokumen 187 Eksempl 7 30 Eksempl	er3669 34974 eer	ksemplar 4,772,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase peningkatan Administrasi Umum	20 %	0

1	05	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	persentase peningkatan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia Jumlah tamu yang dilayani	Jumlah peningkatan Administrasi Umum		20 %	0 Laporan 130 porsi 150 porsi	366934 974 e	ksemplar 16,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase peningkatan Administrasi Umum	20 %	0
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							981,929,000				0	
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Roda 2 yang Disediakan Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Roda 4 yang Disediakan Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Roda 4 yang Disediakan			20 %	6 unit 1 unit 1 Unit		888,909,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	20 %	0
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah pengadaan kursi Jumlah pengadaan kursi eselon III Jumlah pengadaan kursi eselon IV Jumlah pengadaan meja 1/2 biro			20 %	0 Unit 48 buah 4 buah 4 buah 10 buah		93,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	20 %	0
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							236,470,000				0	
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah buku cek yang tersedia jumlah materai yang tersedia				5 buku 400 lembar		4,890,000				0
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah tagihan internet yang tersedia jumlah tagihan rekening listrik yang tersedia jumlah tagihan rekening telepon yang tersedia jumlah tagihan tv kabel				12 paket 12 paket 12 paket 12 paket		29,200,000				0
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		jumlah honor tenaga kebersihan kantor yang tersedia Jumlah pelayanan umum kantor yang tersedia				24 bulan 65 bulan		202,380,000				0

1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							153,090,000				0	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah kendaraan roda 2 yang dibiayai pembayaran pajak dan perizinan Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda 2(dua) Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 4(empat)			20 %	5250 liter 10 unit/tahun 6 unit/tahun	n	141,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	20 %	0
					atau Lapangan												
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah pemeliharaan personal komputer/note book Jumlah pemeliharaan printer Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			20 %	10 Unit/tahun 7 unit/tahun 0 Unit	n	12,090,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	20 %	0
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							6,556,731,700				4,907,500,000	
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							5,687,124,200				3,707,500,000	
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan	Jumlah prosentase penurunan kasus pelanggaran perda	Jumlah Deteksi Dini dan Cegah Dini Jumlah Operasional Lapangan Jumlah Wilayah dalam Pengawasan Patroli	Jumlah prosentase kasus pelanggaran Perda		34 %	24 Data 75 Kali 13 Wilayah	100 %	450,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah prosentase penurunan kasus pelanggaran perda	34 %	450,000,000

					Pengawasan														
1	05	02	2.01	02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa	Jumlah prosentase penurunan kasus pelanggaran perda	Jumlah Personil yang turun ke lapangan, Data dan informasi kasus kebisingan yang di terima, jumlah data yang di tindak lanjuti di lapangan, jumlah gangguan kebisingan yang diselesaikan	Jumlah persentase kasus pelanggaran Perda		34 %	36 Kali	100 %	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah prosentase penurunan kasus pelanggaran perda	34 %	500,000,000		

					dan Kerusuhan Massa													
--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah prosentase penurunan kasus pelanggaran perda	Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan CetakJumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda PosJumlah Belanja Bahan Bakar dan PelumasJumlah Belanja Honorarium PenanggungJawaban Pengelola KeuanganJumlah Belanja Makanan dan Minuman RapatJumlah Belanja Perjalanan Dinas Dalam KotaJumlah Belanja Sewa Kendaraan Bermotor PenumpangJumlah Komponen Perjalanan Dinas BiasaJumlah Komponen untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Jumlah persentase kasus pelanggaran Perda		34 %	700 Lembar50 Lembar13 50 Liter12 Orang/Bu 500 Porsi296 Orang/H2 0 Unit/Hari 6 Komponen17 Komponen	lan100 %arin	120,577,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah prosentase penurunan kasus pelanggaran perda	34 %	400,000,000
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah prosentase penurunan kasus pelanggaran perda	Jumlah Honorarium PenanggungJawaban Pengelola Keuangan Jumlah Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Komponen Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Jumlah Komponen Belanja Pakaian Dinas Lapangan Satlinmas Jumlah Komponen Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Jumlah Komponen Belanja Untuk Kursus Singkat/Pelatihan	Jumlah persentase kasus pelanggaran Perda		34 %	24 Orang/Bu 6 OP 16 Komponen 1 Komponen 1 Komponen 11 Komponen 11 Komponen 2 Komponen	lan n n100 % n	2,873,462,200		Jumlah prosentase penurunan kasus pelanggaran perda	34 %	402,500,000

							Jumlah Komponen untuk Belanja Dinas Dalam Kota Jumlah Komponen untuk Belanja Makanan dan Minuman Rapat Jumlah Komponen untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa Jumlah Komponen untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak Jumlah Komponen untuk Kegiatan Kantor Benda Pos											n 6 Komponen 3 Komponen 1 Komponen
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah prosentase penurunan kasus pelanggaran perda	Jumlah koordinasi dalam dan luar daerah Jumlah peserta bimtek	Jumlah persentase kasus pelanggaran Perda		34 %	79 Orang 30 Orang	100 %	97,433,000	PENDAP ATA ASLI DAERAH (PAD)	N	Jumlah prosentase penurunan kasus pelanggaran perda	34 %	100,000,000
1	05	02	2.01	06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah prosentase penurunan kasus pelanggaran perda	Jumlah kerjasama dan kemitraan Jumlah koordinasi dalam dan luar daerah Jumlah rapat koordinasi yang terlaksana	Jumlah persentase kasus pelanggaran Perda		34 %	20 objek 60 kali 6 kali	100 %	166,121,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah prosentase penurunan kasus pelanggaran perda	34 %	200,000,000

1	05	02	2.01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah prosentase penurunan kasus pelanggaran perda	Jumlah Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Alat Listrik Jumlah Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Jumlah Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Jumlah Belanja Non ASN Jumlah Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Jumlah Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya Jumlah komponen Belanja Modal Alat Perlindungan Lainnya Jumlah Komponen Jasa Tenaga Keamanan Jumlah Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Jumlah persentase kasus pelanggaran Perda	34 %	78 Buah 641 Orang 717 Orang 21 Bulan 150 Bulan 4 Unit 2 Komponen 2 Komponen 8 Buah	100 %	1,125,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah prosentase penurunan kasus pelanggaran perda	34 %	1,125,000,000
1	05	02	2.01	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah prosentase penurunan kasus pelanggaran perda	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan Jumlah koordinasi penyusunan SOP	Jumlah persentase kasus pelanggaran Perda	34 %	1 Dokumen 75 Orang	100 %	106,128,000	PENDAP ATA ASLI DAERAH (PAD)	N	Jumlah prosentase penurunan kasus pelanggaran perda	34 %	130,000,000

1	05	02	2.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah prosentase penurunan kasus pelanggaran perda	Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Benda Pos Jumlah Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Jumlah Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelol Keuangan Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat Jumlah Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Jumlah Komponen Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan A Jumlah Komponen Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Jumlah Komponen Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Jumlah Komponen Belanja Perjalanan Dinas Biasa Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	a Jumlah prosentase kasus pelanggaran Perda TK	34 %	50 Lembar 1000 Liter 12 Orang/Bu 520 Porsi 21 Unit/Hari 15 Komponen 3 Komponen 4 6 n 0 Laporan	lan 100 % n	248,402,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah prosentase penurunan kasus pelanggaran perda	34 %	400,000,000
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota							773,373,500			1,050,000,000	
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase penurunan pelanggaran Perda persentase penurunan pelanggaran perda prosentase penurunan pelanggaran perda	Jumlah Bimtek Penegakan Peraturan Daerah Jumlah Koordinasi dan Pembinaan Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah	Persentase Penurunan pelanggaran perda	100 % & 100 %	15 kali 15 kali 120 kali	100 %	282,072,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda persentase penurunan pelanggaran perda prosentase penurunan pelanggaran perda	100 % & 100 %	300,000,000

1	05	02	2.02	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase penurunan pelanggaran Perda persentase penurunan pelanggaran perda prosentase penurunan pelanggaran perda	Jumlah koordinasi dalam dan luar daerah Jumlah pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda Jumlah rapat money	Persentase Penurunan pelanggaran perda		100 % 100 & 100 %	10 kali 150 kali 4 kali	100 %	161,896,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda persentase penurunan pelanggaran perda prosentase penurunan pelanggaran perda	100 % 100 & 100 %	250,000,000
1	05	02	2.02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase penurunan pelanggaran Perdapersentase penurunan pelanggaran perdaprosentase penurunan pelanggaran perda	Jumlah Koordinasi Dalam dan Luar DaerahJumlah Penegakan Perda secara Non yustisiJumlah Penegakan Perda Secara YustisiJumlah Rapat Sekretariat Bersama PPNS	Persentase Penurunan pelanggaran perda		100 %100 &100 %	30 kali24 kali10 kali4 kali	100 %	329,405,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penurunan pelanggaran Perdapersentase penurunan pelanggaran perdaprosentase penurunan pelanggaran perda	100 %100 &100 %	500,000,000
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota							96,234,000		150,000,000			
1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	0persentase penurunan pelanggaran perda Presentase Penurunan Pelanggaran perda	Jumlah Bimtek PPNS SatpolPP Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah Jumlah pengirimana PPNS	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda		5 % 5 %	15 Orang 50 Orang 3 Orang	100 %	96,234,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0persentase penurunan pelanggaran perda Presentase Penurunan Pelanggaran perda	5 % 5 %	150,000,000
TOTAL												13,709,005,636		17,710,000,000			

BAB IV RENCANA KERJA AKHIR DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN 2023

Pada tahun anggaran 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota, merencanakan program dan kegiatan sebagai bentuk penjabaran dari Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Program dan kegiatan dimaksud adalah 2 program dan 10 Kegiatan, 40 Sub Kegiatan dengan rencana anggaran Rp 13,709,005,636.00

Dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 ini bertujuan untuk mendukung visi dan misi pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan memuat arah kebijakan, sasaran kegiatan, serta program yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan.

Rencana Kerja ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada Tahun 2024 akan diadakan Pemilihan Umum (pemilu) dan Pemelihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak sehingga Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023 akan melakukan peningkatan Keamanan agar situasi tetap aman dan kondusif dengan meningkatkan patroli rutin, Razia wilayah yang akan dicurigai berpotensi meningkatkan situasi kurang kondusif, serta mengadakan pelatihan untuk tenaga Satlinmas yang akan terjun langsung dalam penjagaan posko posko pemilu baik di tingkat Jorong, Nagari dan Kecamatan dan Tingkat Kabupaten dan pengadaan pakaian dinas lapangan untuk Satlinmas.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja menguraikan program bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja maka penetapan tujuan dan sasaran pembangunan dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dapat lebih terfokus, terarah, tercapai, maju dan berkembang. Adapun program / kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

NO	Bidang Urusan	Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2023		Tahun 2024	Ket	
		Program		Pagu Indikatif (Rp)	Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp)		
		Jumlah	Total Pagu (Rp)		Jumlah	Total Pagu (Rp)			
	URUSAN PEMERINTAHAN WILAYAH DAN KETERTIBAN UMUM		JIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		JASAR BIDANG KETENTRAMAN DAN				
1	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMRINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2	Rp 13,709,005,636.00	Rp 13,862,095,636.00	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 157,819,200.00	Rp 7,305,363,936.00		
					Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 5,025,716,936.00			
					Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 478,072,200.00			
					Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 119,176,600.00			
					Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 981,929,000.00			
					Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 236,470,000.00			
					Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 153,090,000.00			
	2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5,687,124,200.00	Rp 6,556,731,700.00	
						Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	Rp 773,373,500.00		
						Kegiatan : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rp 96,234,000.00		

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja yang berpedoman kepada Rencana Strategis OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan tidak mengesampingkan data/ masukan/ rekomendasi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota, unsur masyarakat pada acara Forum Rencana Kerja Akhir Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023.

Dokumen Renja OPD disusun disesuaikan dengan kondisi kebutuhan anggaran dalam menunjang program kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023. Kebutuhan pendanaan yang telah dikompilasikan dalam Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (renja) OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 disusun dengan memperhatikan antara lain :

1. Rekomendasi/usulan dari unsur masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Kegiatan lanjutan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2023 wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipatif dan koordinatif untuk pencapaian sasaran dan arah kebijakan pada setiap prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam mengimplementasikan Rancangan Akhir Rencana Kerja (renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja OPD tahun 2023 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun program kerja OPD, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD Tahun Anggaran (TA) 2023;
2. Pada akhir tahun anggaran 2023, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Lima Puluh Kota wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturanperaturan lainnya.

Demikian Dokumen Rencana Kerja Akhir Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 disusun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023.

